

# PENGATURAN-PENGATURAN KEAMANAN DI ASIA TENGGARA\*

Jusuf WANANDI

## I. PENDAHULUAN

Dalam konteks Asia Tenggara, bidang keamanan mencakup banyak soal -- politik, ekonomi, sosial, dan bahkan kebudayaan dan ideologi -- dan bukan semata-mata masalah militer dalam arti konvensional. Jadi, suatu diskusi mengenai pengaturan-pengaturan keamanan di Asia Tenggara perlu mempertimbangkan semua aspek kehidupan.

Persepsi keamanan erat hubungannya dengan persepsi ancaman. Dalam jangka menengah, ancaman utama bagi ASEAN pada dasarnya bersifat *intern*. Hal itu adalah suatu fungsi tingkat keberhasilan pemerintah-pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan harapan rakyat yang terus meningkat. Stabilitas dan kemakmuran erat berhubungan satu dengan yang lainnya. Bangsa-bangsa ASEAN menggunakan strategi pembangunan dengan suatu ekonomi pasar sebagai suatu sarana pertumbuhan, berbarengan dengan peranan aktif dari pemerintah untuk menjaga distribusi yang pantas dari keuntungan pembangunan. Tugas ini menjadi lebih sulit lagi jika faktor ekstern menciptakan suatu lingkungan yang mengharuskan pemerintah masing-masing untuk mengalihkan perhatian dan sumber-sumber daya mereka dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jadi, meskipun ancaman utama bagi ASEAN bersumber dari dalam, dimensi-dimensi *ekstern* masalah-masalah keamanan ASEAN harus secara sungguh-sungguh dihadapi.

Tulisan ini difokuskan pada dimensi-dimensi ekstern keamanan ASEAN. Anggapan umum di ASEAN ialah bahwa faktor-faktor ekstern merupakan ancaman yang hanya bersifat nomor dua. Hal ini diperoleh dari pengalaman bahwa infiltrasi dan subversi hanya efektif jika keadaan setempat menjadi bu-

---

\* Terjemahan makalah Jusuf Wanandi pada Konperensi Korea-Indonesia ke-2 yang diorganisasi oleh IFES dan CSIS, Seoul, 11-13 Oktober 1980, oleh Oct. Ovy Ndouk, staf CSIS

ruk. Akan tetapi, perkembangan di Asia Tenggara akhir-akhir ini, yakni konflik Indocina dan meningkatnya konflik Cina-Soviet di arena Asia Tenggara sebagai akibatnya, dapat berpengaruh langsung pada keamanan ASEAN. Orang hanya perlu memperhatikan tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh konflik Indocina terhadap Muangthai untuk menilai pengaruh-pengaruh perkembangan itu terhadap ASEAN sebagai keseluruhan.

## II. DIMENSI-DIMENSI EKSTERN KEAMANAN ASEAN

### 1. Tantangan-tantangan

Mengingat perkembangan di Asia Tenggara, ancaman ekstern terhadap ASEAN bisa berasal dari Vietnam, Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Jika dilihat dari segi waktu, Vietnam merupakan ancaman langsung terhadap ASEAN sebagian besar karena limpahan invasi dan terus berlangsungnya pendudukan atas Kamboja oleh Vietnam. Muangthai secara langsung merasakan tekanan-tekanan dari konflik Indocina sepanjang perbatasannya, tetapi tidak mengambil bagian dalam konflik. Dalam jangka pendek, Vietnam dapat mempengaruhi stabilitas Muangthai. Jika dalam mengejar musuh pasukan Vietnam dihadapi oleh tentara Muangthai (seperti pada pertengahan Juni 1980) atau mereka menggilas tentara Muangthai sepanjang perbatasan atau jika Vietnam menduduki bagian tertentu Muangthai (misalnya 16 propinsi yang selalu dipersoalkan antara Muangthai, Kamboja dan Laos) tekanan-tekanan politik pada pemerintah di Bangkok akan meningkat. Ketidakstabilan dapat timbul dan situasi dalam negeri Muangthai akan menjadi lebih kompleks lagi. Vietnam juga dapat mempengaruhi stabilitas Muangthai dengan mendesak pengungsi-pengungsi ke luar dari Kamboja dan Laos dan masuk ke Muangthai. Muangthai telah menanggung beban yang berat dengan telah adanya 600.000 pengungsi di negara itu.

Dalam jangka yang lebih panjang, kemungkinan invasi tidak dapat diabaikan karena ambisi Vietnam mungkin lebih besar daripada atas Indocina. Vietnam bisa memutuskan untuk meluaskan lingkungan pengaruhnya untuk meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara sebagaimana dinyatakan secara resmi oleh partai Lao Dong. Dalam jangka pendek Vietnam kiranya tidak akan melaksanakan suatu rencana seperti itu karena menghadapi kesulitan-kesulitan besar di dalam negeri dan menderita kemunduran ekonomi yang drastis dalam pembangunan perekonomiannya. Dia juga terus menghadapi kesulitan-kesulitan menyerap dan mengintegrasikan Vietnam bagian selatan. Beban militer Vietnam menduduki Kamboja menjadi semakin besar dengan berlalunya waktu dan hal ini boleh jadi tidak memungkinkan suatu keterlibat-

an dengan Mungthai. Selain panjangnya garis komunikasi yang harus diamankan untuk suatu operasi seperti itu, tidak terdapat dukungan dari dalam Muangthai, sebagian besar karena Partai Komunis Muangthai berorientasi ke RRC.

Langkah-langkah diplomatik ke arah suatu penyelesaian di Kamboja jelas akan melibatkan suatu jaringan tindakan yang sulit yang mencakup hubungan ASEAN dan Vietnam, Vietnam dan Cina, Vietnam dan Uni Soviet, Cina-Soviet, maupun Amerika Serikat dan Jepang.

Prakarsa diplomatik ASEAN terhadap Vietnam hendaknya mencoba untuk mencapai dua sasaran, yakni:

- meyakinkan Vietnam bahwa kalau ingin berkembang secara ekonomi ia tidak dapat semata-mata bergantung pada Uni Soviet dan COMECON, dan bahwa untuk memperoleh bantuan dari masyarakat internasional dia harus mengambil suatu sikap kerja sama yang sungguh-sungguh terhadap ASEAN;
- meyakinkan Vietnam bahwa dia harus menemukan suatu penyelesaian politik yang dapat diterima di Kamboja karena secara militer saja Vietnam tidak dapat memecahkan masalahnya dalam satu sampai dua tahun mendatang. Selain beban bagi ekonomi Vietnam, keterlibatan militer Vietnam yang berlarut-larut di Kamboja memberikan alasan yang sah kepada Cina untuk terus meningkatkan pengaruhnya atas Indocina dan Asia Tenggara pada umumnya. Selain itu, ASEAN harus menjelaskan, bahwa petualangan ini hanya dapat memperburuk hubungan Vietnam dengan ASEAN, menghancurkan bangsa Khmer, dan akhirnya, sama sekali mengucilkan Vietnam dari masyarakat internasional. Sikap masyarakat internasional di PBB seharusnya telah mengingatkan Vietnam tentang hal ini.

Suatu penyelesaian politik di Kamboja secara ideal akan meliputi penarikan pasukan-pasukan Vietnam, suatu referendum oleh rakyat Khmer di bawah pengawasan PBB, dan pembentukan suatu pemerintahan yang populer.

Orang harus mengakui bahwa agak tipis kemungkinan suatu penyelesaian politik yang segera. Dengan cara bagaimanapun juga, situasi di medan harus dipecahkan dahulu; hal ini bisa dicapai dengan penghancuran kekuatan Pol Pot secara menyeluruh atau peningkatan kemampuan mereka yang bisa memaksa Vietnam ke dalam posisi di mana mereka harus memikul beban-beban yang semakin berat di Kamboja dan hal ini akhirnya akan memaksa mereka untuk mencari kompromi.

Karena Asia Tenggara adalah arena persaingan Cina-Soviet, suatu keruwetan lagi telah dimasukkan. Kedua negara itu akan terus-menerus mencoba untuk meningkatkan lingkungan pengaruhnya di Asia Tenggara melalui "wakil-wakil" mereka.

Vietnam secara tidak langsung didukung oleh Uni Soviet melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama bulan November 1978, yang meliputi dukungan logistik, menyediakan data-data intelijens serta dukungan politik dan ekonomi. Peningkatan kehadiran militer Soviet di Asia Tenggara (di Danang dan Cam Ranh Bay) juga mengganggu ketenangan.

Keterlibatan Cina dalam konflik Indocina berakibat ganda. Pertama, dia telah menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan tekanan-tekanan fisik terhadap Vietnam, dan dengan cara ini dia mengurangi beberapa tekanan yang telah ditimbulkan oleh Vietnam terhadap ASEAN. Kedua, Cina dapat memperbesar konflik Cina-Vietnam yang menyebabkan Uni Soviet semakin melibatkan diri di dalamnya dan membawa-bawa AS serta ASEAN maupun meluaskan area konflik ke seluruh kawasan Asia Tenggara.

Masalah pokok di sini adalah mengurangi konfrontasi antara Vietnam dan Cina. ASEAN dapat memainkan suatu peranan diplomatik dalam bidang ini dengan melanjutkan dialog dengan kedua belah pihak. Meningkatnya kehadiran Uni Soviet di kawasan ini terutama disebabkan oleh konflik ini, dan belum jelas apakah Uni Soviet bermaksud mendukung usaha-usaha penyelesaian konflik dan secara demikian mengurangi ketegangan di kawasan itu. Belum jelas juga apakah dalam keadaan itu Vietnam mampu mengurangi ketergantungannya dari atau melonggarkan hubungannya dengan Uni Soviet karena tekanan-tekanan dari Cina. Seperti telah disinggung di atas, untuk pertama kali Vietnam telah mengumumkan kemungkinan memberikan fasilitas yang tetap kepada Uni Soviet di Cam Ranh Bay dan Danang. Mereka juga telah membentuk suatu operasi bersama untuk eksploitasi minyak lepas pantai. Adalah penting untuk dicatat bahwa Vietnam dan Uni Soviet menjadi semakin berminat pada Laut Cina Selatan dan pulau-pulau yang ada di sana.

Ancaman langsung terhadap ASEAN adalah Vietnam, karena ancaman Soviet yang lebih besar yang membayang di belakangnya. Cina, di lain pihak, masih dianggap sebagai ancaman potensial sekalipun jauh terhadap ASEAN. Jika konvergensi kepentingan antara ASEAN dan Cina dapat berkembang di masa mendatang, sikap Cina yang lebih moderat berkenaan dengan kebijaksanaan dalam negeri dan luar negerinya dapat dipertahankan, dan jika pemimpin-pemimpin politik Cina akan lebih menekankan hubungan antar-pemerintah daripada hubungan antar-partai, maupun akan lebih sensitif bagi perlunya mendukung usaha-usaha negara-negara ASEAN dalam memecahkan

masalah-masalah Cina perantauan mereka, maka Indonesia bisa mengambil suatu sikap yang baru berkenaan dengan hubungan diplomatiknya dengan Cina. Pernah dikemukakan, bahwa ASEAN akan mampu mengambil prakarsa-prakarsa diplomasi hanya setelah Indonesia memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Cina. Pada saat yang sama, ASEAN akan mencoba untuk meningkatkan hubungan dengan Hanoi. Stabilitas di Asia Tenggara mungkin terjamin jika ASEAN menjalin hubungan yang aktif dan lebih berimbang dengan Cina dan Vietnam.

Selain prakarsa diplomatik, ASEAN hendaknya juga siap untuk suatu tanggapan militer sebagai jalan terakhir. Kemampuan militer negara-negara ASEAN secara berangsur-angsur harus dikembangkan sampai pada tingkat yang diperlukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam bidang ini kiranya akan diperkuat walaupun tidak akan menjadi suatu pakta militer. Semua negara ASEAN menyadari bahwa suatu pakta militer bukan jawaban yang tepat terhadap ancaman yang langsung mereka hadapi, karena sebagian besar ancaman itu bersumber dari dalam negeri. Agaknya, mereka akan terus meningkatkan kerja sama militer atas dasar *bilateral* karena ini kiranya akan dianggap cukup untuk menghadapi ancaman dari luar dalam waktu dekat. Jika Muangthai menghadapi ancaman yang nyata di sepanjang perbatasannya, maka ke-empat negara ASEAN lainnya secara lepas satu sama lain dapat memberikan bantuan yang diperlukan, misalnya suplai bahan kebutuhan strategis seperti minyak dan makanan.

Peningkatan kemampuan militer negara-negara ASEAN harus dilakukan secara berangsur-angsur, untuk tidak menimbulkan beban yang besar atas pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam jangka pendek dan menengah perbaikan militer hanya akan terbatas pada peningkatan kemampuan mereka untuk menghadapi meningkatnya subversi dan infiltrasi. Dalam jangka yang lebih panjang, yakni 5 sampai 10 tahun, kemampuan militer itu dapat ditingkatkan lagi untuk menghadapi ancaman-ancaman potensial dari luar perbatasan-perbatasan mereka. Dalam hal ini, AS dapat membantu negara-negara ASEAN dengan transaksi-transaksi militer secara terjamin dan teratur, serupa dengan penjualan-penjualan kepada Muangthai baru-baru ini.

Usaha-usaha ASEAN untuk terus membangun perekonomian dan memperluas kerja sama ekonomi juga merupakan suatu jawaban yang perlu, di samping usaha-usaha diplomasi politik dan usaha-usaha keamanan militer yang telah dibahas. Suatu usaha kerja sama ekonomi yang kuat dan luas dasarnya dapat menjamin kelangsungan hidup ASEAN dalam jangka yang lebih panjang. Suatu perluasan struktur kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dapat lebih memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN melalui pening-

katan hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara industri di kawasan yang merupakan partner dagang utama dan sumber modal serta teknologi.

## 2. Tanggapan-tanggapan

Negara-negara ASEAN menginginkan stabilitas dan perdamaian sehingga mereka dapat membangun. Ini merupakan tantangan utama yang dihadapi negara-negara ASEAN. Oleh karena itu kepentingan jangka panjang ASEAN-lah untuk menciptakan dasar bagi tata regional di Asia Tenggara, suatu tata yang dapat dicapai, yang dipatuhi semua pihak yang bersangkutan. Adanya tata regional mencakup tiadanya hegemoni kekuatan besar manapun dan adanya kebebasan bagi tiap-tiap negara di kawasan untuk membangun sesuai dengan aspirasi dan karakter mereka. Persoalan apakah kekuatan-kekuatan luar menerima atau tidak usul ini menjadi tidak penting pada saat *semua* negara di kawasan ini bertekad untuk mewujudkan sasaran tata regional itu. Berpegang teguh pada prinsip ini akan mengurangi, jika tidak melenyapkan sama sekali, kesempatan intervensi dan campurtangan luar terhadap masalah-masalah intern kawasan.

Harus dinyatakan pada permulaan bahwa suatu tata regional di Asia Tenggara mungkin tidak perlu didasarkan pada persetujuan tertulis yang formal karena gagasan itu terletak pada konvergensi kebutuhan yang dirasakan negara-negara di kawasan itu. ASEAN telah berkembang dan tumbuh justru karena telah mempertahankan suatu tingkat fleksibilitas yang tinggi dan tidak dibelenggu oleh peraturan-peraturan yang ketat. Tetapi realisasi suatu tata regional tergantung pada maksud mendatang Vietnam.

Untuk mendukung usaha-usaha ASEAN sebagaimana dibahas di atas, ASEAN harus mencoba mempertahankan suatu lingkungan dengan kehadiran seimbang ke-empat kekuatan besar - AS, Uni Soviet, RRC, dan Jepang - di Asia Tenggara. Kehadiran seimbang seperti itu akan mempertinggi stabilitas di Asia Tenggara. Untuk mencapai sasaran ini, suatu struktur hubungan yang istimewa perlu diadakan dengan masing-masing dari kekuatan-kekuatan besar itu.

Bagi ASEAN, cara AS menangani dan mengatur hubungannya dengan RRC adalah penting untuk arah perkembangan mendatang di kawasan itu. Suatu persekutuan *de facto* antara AS dan RRC sudah dapat menyebabkan gangguan yang menambah ketidakstabilan yang memang sedang meluas di kawasan Asia-Pasifik, sebagian besar sebagai akibat reaksi berlebihan Uni Soviet. Keinginan AS untuk meluaskan dan mengintensifkan hubungannya

dengan RRC guna mengimbangi Uni Soviet, khususnya setelah invasi Soviet ke Afghanistan, dapat dimengerti jika dilihat dari suatu perspektif global belaka. Akan tetapi AS perlu mempertimbangkan kondisi regional juga. Kenyataannya dalam menghadapi Uni Soviet, tampaknya ada usaha-usaha yang dilakukan oleh AS untuk mendirikan suatu pola pembagian tugas, baik secara global maupun secara regional, di mana Jepang juga diberi suatu peranan. Dalam hal ini, AS tidak boleh mendorong Jepang terlampau keras dan terlalu cepat untuk meningkatkan peranan militernya. Terlepas dari kenyataan bahwa diperlukan waktu agar suatu konsensus orang-orang Jepang mengenai peranan baru ini dicapai dalam cara yang pantas, Jepang juga perlu mengadakan suatu mekanisme konsultasi yang lebih baik dengan sahabat-sahabatnya di Asia Tenggara untuk memudahkan diskusi-diskusi yang teratur mengenai persoalan ini selama proses pembangunan militernya.

Dipakainya kartu Cina oleh AS menimbulkan keprihatinan di Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara menganggap RRC sebagai suatu ancaman potensial. Persepsi ancaman ini tidak akan mudah dicabut. Secara geografis, RRC merupakan satu-satunya kekuatan besar yang langsung hadir sangat dekat dengan Asia Tenggara. Tambahan pula, ambisi-ambisi perdamaian Cina (*pax sinica ambitions*), adalah suatu kenyataan sejarah yang tak mudah dilupakan. Diakui oleh negara-negara ASEAN bahwa ancaman RRC tidak di ambang pintu.

ASEAN mengharapkan bahwa AS akan mengajukan suatu kebijaksanaan yang dibatasi secara jelas terhadap ASEAN di satu pihak dan RRC di lain pihak. Hubungan ASEAN dengan AS telah berlangsung lama, dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi serta secara terbatas juga dalam bidang militer seperti halnya dengan Pilipina dan Muangthai. Keasyikan AS dalam hubungannya dengan RRC cenderung untuk memperkuat sikap keras yang diambilnya terhadap Vietnam. Hal ini merupakan suatu penghambat bagi suatu penyelesaian politik masalah Kamboja. Negara-negara ASEAN mengharapkan dari AS penjelasan lebih lanjut mengenai peranan dan kehadiran militernya di Asia Tenggara. Kehadiran militer AS di kawasan sekarang ini cukup, asal menjadi lebih dapat dipercaya. Antara lain itu akan mencakup suatu rencana -- yang terperinci -- untuk menghadapi invasi Vietnam ke Muangthai maupun penjualan peralatan militer yang lebih berarti dan lancar. Selanjutnya, AS harus lebih banyak mengadakan konsultasi dan dialog dengan ASEAN mengenai peranan politiknya di kawasan ini, khususnya berkenaan dengan masalah Kamboja maupun kebijaksanaannya terhadap Vietnam, peranan RRC di kawasan Asia-Pasifik, peranan politik dan militer Jepang, dan kebijaksanaan menghadapi perluasan kehadiran militer Soviet di Asia Tenggara.

Kehadiran Soviet di kawasan ini tak dapat dihindarkan. Kehadirannya mungkin berguna untuk mengimbangi RRC. Tetapi persoalan pokoknya berhubungan dengan tingkat kehadiran di mana kedua negara itu akan saling mengimbangi. Suatu peningkatan persaingan Cina-Soviet di Asia Tenggara harus dicegah. Kuncinya terletak pada RRC dan Vietnam. Tetapi tingkah laku Soviet dalam konflik Indocina, yang secara tidak langsung dilaksanakan melalui Vietnam, merupakan suatu faktor ketidakstabilan juga bagi kawasan itu. Inisiatif Soviet di kawasan ini tetap ditanggapi dengan skeptis oleh negara-negara ASEAN selama persaingan Cina-Soviet terus berlangsung. Akan tetapi terdapat alasan-alasan lain juga. Reaksi Soviet yang pertama terhadap dibentuknya ASEAN sangat tidak simpatik; ASEAN dituduh sebagai ciptaan orang-orang Amerika untuk menggantikan SEATO. Sikap Uni Soviet tampaknya telah berubah sejak dua tahun terakhir. Namun tetap tanda tanya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya apakah sikap baru ini sungguh-sungguh atau hanya suatu taktik untuk mendukung sasaran-sasaran jangka pendek (konflik Indocina) dan jangka panjangnya (persaingan Cina-Soviet) di Asia Tenggara.

Uni Soviet, hingga kini, tidak mengambil suatu sikap bermusuhan secara langsung terhadap ASEAN atau Indonesia. Sebaliknya, Uni Soviet terus-menerus mendekati ASEAN. Uni Soviet mempertahankan suatu hubungan antar-pemerintah yang baik dan tampaknya tidak menganjurkan hubungan antar-partai. Langkah-langkah mereka yang secara relatif berhati-hati menggambarkan sikap mereka yang pada dasarnya konservatif dalam menggunakan kesempatan, yakni hanya jika harapan berhasil itu besar. Juga telah dikemukakan bahwa langkah Soviet akan berbeda jika menghadapi negara-negara komunis atau negara-negara di bawah suatu kepemimpinan komunis sebagaimana dibentangkan dalam doktrin Brezhnev. Jadi, Vietnamlah yang harus sangat kuatir.

Dilihat semata-mata dari segi kemampuan militernya, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas di Vietnam, Uni Soviet memperoleh kemungkinan lebih besar untuk melakukan tekanan-tekanan politik, meningkatkan kegiatan subversi, mungkin melalui Vietnam, atau menciptakan kekacauan di perairan Asia Tenggara terhadap instalasi-instalasi lepas pantai dari perusahaan-perusahaan minyak atau jalur maritim pada umumnya.

Pada saat ini, kehadiran militer Soviet di kawasan tidak akan efektif sebagai suatu perangkat untuk melakukan tekanan-tekanan politik pada negara-negara ASEAN. Kehadiran Soviet ini tidak mengancam ASEAN dan sampai batas-batas tertentu akan bergantung pada kredibilitas kehadiran AS di kawasan ini. Tambahan pula, keefektifan ancaman Soviet tergantung pada kondisi intern negara-negara ASEAN masing-masing. Infiltrasi dan subversi oleh Uni Soviet kiranya tidak akan dilakukan berhubung kurangnya

prasarana yang diperlukan di negara-negara ASEAN. Partai-partai komunis di kawasan ini lebih berafiliasi dengan RRC daripada dengan Uni Soviet.

Langkah-langkah Uni Soviet untuk menciptakan kekacauan di perairan Asia Tenggara dengan mencegat jalur-jalur laut yang vital akan menjadi suatu masalah internasional yang serius dan bukan hanya masalah Asia Tenggara sendiri. AS dan Jepang adalah pihak-pihak yang akan sangat terkena oleh langkah-langkah Soviet seperti itu.

Secara keseluruhan dapat dikatakan, bahwa negara-negara ASEAN tidak terlalu cemas dengan kehadiran militer Soviet di kawasan ini. Alasan utamanya adalah kurangnya persoalan pokok dan kesempatan yang dapat digunakan Uni Soviet untuk tujuan apapun yang dikehendakinya. Dari suatu perspektif strategi yang lebih luas, kestabilan Asia Tenggara melibatkan suatu kehadiran berimbang kekuatan-kekuatan besar, termasuk Uni Soviet. Konsep ZOPFAN menolak suatu dominasi atau hegemoni satu kekuatan besar. Apa yang ingin dicapai ASEAN dalam jangka menengah adalah mendorong Uni Soviet untuk mengambil bagian dalam usaha menciptakan suatu "tata regional" di Asia Tenggara. Bahkan ada kemungkinan bahwa kehadiran Soviet akan diperlukan untuk mengimbangi RRC dalam jangka yang lebih panjang. Suatu kehadiran berimbang AS dan Uni Soviet di Asia Tenggara dapat dipertahankan karena kenyataannya Asia Tenggara bukan suatu area vital dalam konflik Timur-Barat.

Perbaikan hubungan antara ASEAN dan Uni Soviet dapat dicapai jika Uni Soviet menunjukkan usaha-usaha yang serius untuk mendorong Vietnam agar mau berkompromi mengenai penyelesaian politik masalah Kamboja. Ini akan merupakan batu ujian yang penting bagi negara-negara ASEAN mengenai kemauan baik Uni Soviet. Dengan melakukan hal seperti itu, Uni Soviet juga akan menciptakan suatu suasana yang mengurangi kemungkinan meluasnya konflik Cina-Soviet ke Asia Tenggara.

Dalam meneliti peranan RRC perlu dipahami bahwa Asia Tenggara tetap mencurigai RRC dan maksud-maksud jangka panjangnya di kawasan ini. Perubahan-perubahan intern di RRC baru-baru ini belum dapat memberikan suatu jaminan bahwa kecenderungan-kecenderungan dalam sikap politik RRC sekarang ini terhadap dunia, termasuk Asia Tenggara, akan dipertahankan. Selama 20 tahun terakhir, radikalisasi kebijaksanaan RRC terjadi tiga kali. Indonesia, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan RRC, khususnya dalam tahun 1965 dengan adanya kudeta yang gagal oleh Partai Komunis Indonesia yang didukung oleh Beijing. Jadi, arah mendatang hubungan dengan RRC akan bergantung pada apakah garis moderat yang baru ditegakkan akan bertahan dalam era sesudah Deng.

Dalam arti strategi militer, diakui bahwa RRC bukan merupakan suatu ancaman nyata terhadap negara-negara ASEAN untuk 10 tahun mendatang. Kemampuan militernya yang terbatas lebih ditujukan ke jurusan utara, dan mengingat keadaan ekonomi serta taruhan politik yang besar dalam keberhasilan usaha-usaha pembangunan ekonomi, RRC kiranya tidak akan memulai pembangunan militer secara besar-besaran dalam masa dekat mendatang. Akan tetapi pengalaman menunjukkan, bahwa terhadap Asia Tenggara subversi dan infiltrasi merupakan alat-alat yang digunakan RRC, di mana hubungan antar-partai ditonjolkan. Sampai sekarang, pemimpin-pemimpin RRC gagal memberikan jaminan yang diperlukan kepada ASEAN bahwa cara beroperasi seperti ini tidak akan digunakan.

Dalam keadaan Asia Tenggara sekarang ini, konflik Indocina merupakan suatu sumber utama keprihatinan negara-negara ASEAN. Tak dapat disangkal bahwa peranan RRC dalam konflik ini penting, tetapi kebijaksanaan yang dianutnya sejauh ini bertentangan dengan kepentingan Asia Tenggara untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Sikap RRC terhadap Vietnam cenderung untuk memperluas konflik Cina-Soviet di Asia Tenggara. RRC harus menunjukkan bukti yang jelas bahwa dia mau melibatkan dirinya secara yang lebih konstruktif dalam urusan-urusan regional Asia Tenggara. ASEAN mengakui bahwa RRC harus memainkan suatu peranan di Asia Tenggara, karena kebijaksanaan dan tindakannya mempengaruhi stabilitas Asia Tenggara. Akan tetapi RRC harus memberikan bukti-bukti. Perubahan intern baru-baru ini di RRC belum merupakan jaminan bagi negara-negara ASEAN bahwa di masa mendatang RRC akan menjadi unsur yang baik dalam perimbangan kekuatan kawasan itu.

Jepang sebagai kekuatan besar lainnya, tetap merupakan partner ekonomi yang penting bagi ASEAN dalam dekade 1980-an. Struktur hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia (dan ASEAN pada umumnya) sekarang ini harus mengalami perubahan jika hubungan persahabatan ini akan dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Berhasilnya usaha-usaha pembangunan ekonomi ASEAN menimbulkan kebutuhan dan tantangan-tantangan baru.

ASEAN menyambut baik suatu peranan yang lebih besar oleh Jepang baik secara global maupun regional. Sejak tahun 1979, Jepang mengambil sejumlah inisiatif yang konstruktif. Secara global, dalam kerja sama dengan AS dan Eropa Barat, Jepang melibatkan dirinya dengan cara yang berarti untuk membantu Pakistan dan Mesir. Bantuan khusus Jepang untuk Muangthai, bantuan untuk meringankan masalah-masalah pengungsi, dukungan politik kepada ASEAN untuk menemukan suatu penyelesaian masalah Kamboja, adalah tanda-tanda positif arah mendatang peranan politik orang-orang Jepang yang

semakin besar di kawasan Asia-Pasifik. ASEAN mengharapkan lebih banyak dialog dan konsultasi dengan Jepang mengenai hal-hal kepentingan politik bersama. Jepang merupakan alat dalam dialog Utara-Selatan, khususnya dalam pembentukan Dana Bersama maupun dalam penerapan perlakuan baru bagi hasil-hasil daerah tropis di pasaran negara-negara industri dalam rangka GATT.

Berkenaan dengan kemungkinan peranan militer Jepang, Jepang harus secara terbuka mendiskusikan masalahnya dan berkonsultasi dengan sahabat-sahabat dan sekutu-sekutunya, termasuk negara-negara ASEAN. Tampaknya tak dapat dihindarkan bahwa Jepang harus bergerak untuk memainkan peranan militer yang lebih besar, tetapi ini harus dilakukan setahap demi setahap. Pembentukan suatu mekanisme konsultasi akan menghindari salah interpretasi atau bahkan oposisi oleh negara-negara di kawasan.

Pertahanan tanah air dan perairan Jepang sendiri merupakan langkah pertama, tetapi, pada tahap berikutnya, Jepang harus memperhatikan keamanan jalur-jalur laut yang vital. Yang terakhir ini dapat melibatkan suatu pengaturan pembagian tugas dengan negara-negara di kawasan, seperti ASEAN. ASEAN tidak akan menentang suatu perkembangan seperti itu jika Jepang melakukannya secara berangsur-angsur, dalam rangka pengaturan-pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat dan setelah berkonsultasi dengan negara-negara di kawasan.

### III. KESIMPULAN

Telah harus jelas dari pembahasan di atas bahwa pengaturan keamanan di Asia Tenggara tidak akan meliputi suatu struktur yang formal dan ketat. Pengaturan itu kiranya akan lebih terungkap dalam suatu rangkaian usaha untuk mengharmoniskan tindakan dan pengaruh timbal-balik untuk menjamin kepentingan-kepentingan keamanan dalam arti kata yang lebih luas. Dalam bidang ini, negara-negara ASEAN ingin memainkan peranan yang lebih besar. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa sumber utama ancaman bagi keamanan mereka berasal dari dalam negeri, dan mereka sendiri harus menanganinya dan dapat mengatasi kemungkinan perkembangan itu.

Namun hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan luar merupakan unsur penting dalam usaha-usaha ASEAN untuk menjamin stabilitas di Asia Tenggara. ASEAN ingin melihat kehadiran dan peranan kekuatan-kekuatan besar -- Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC dan Jepang -- berkembang

sedemikian rupa sehingga memudahkan terciptanya suatu tata regional di Asia Tenggara. Tata seperti itu mencakup suatu kehadiran berimbang kekuatan-kekuatan besar.

Juga diakui bahwa akibat meningkatnya interdependensi di dunia sekarang ini, perkembangan-perkembangan dan peristiwa-peristiwa di suatu kawasan akan mempengaruhi kawasan lainnya. Keamanan dan kestabilan di Asia Timur Laut, termasuk Korea, juga akan mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Di lain pihak, ASEAN dapat ikut menunjang stabilitas di kawasan Asia-Pasifik pada umumnya jika masing-masing negara anggota dapat mempertahankan usaha-usaha pembangunan mereka dan dapat mengatasi pergesekan-pergesekan di antara mereka dalam masa mendatang sebagaimana telah dapat mereka lakukan hingga kini. Terciptanya suatu tata regional dapat lebih lanjut meningkatkan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.